

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2000 memberikan dampak dari tuntutan masyarakat agar lebih meningkatkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa agar tercipta dan terselenggara pemerintahan yang baik dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Paradigma tersebut mewajibkan agar setiap satuan kerja perangkat daerah termasuk pemerintah untuk lebih mempertanggungjawabkan keuangan daerah serta mampu memberikan laporan informasi keuangan yang berkualitas secara transparan kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat lebih berguna bagi para pengguna, *stakeholder* dan masyarakat jadi, dalam mewujudkan upaya tersebut pemerintah harus melakukan tindakan perbaikan dalam laporan keuangan supaya laporan keuangan yang berkualitas (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010).

Semua entitas termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana laporan keuangan ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD) serta yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja entitas tersebut. Keuangan daerah dalam PP Nomor 58 tahun 2005 merupakan hak dan kewajiban sebuah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang di dalamnya termasuk bentuk dan segala kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU No 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dimiliki oleh daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan adanya keuangan daerah untuk pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat (Khusaini, 2018).

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I-2020 untuk tahun pelaporan 2019, mencatat masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dari 56 LKPD Tahun 2019 yang diperiksa BPK, tercatat sebagai berikut :

Tabel 1.1

Fenomena

No	Opini	Jumlah LKPD	Persen
1	WDP	56	9 %
2	TMP	0	1 %
3	WTP	0	0 %
	Jumlah	36	10 %

Sumber : www.bpk.go.id

LKPD Tahun 2019 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Badan pemeriksa keuangan juga mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1,52%. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah (www.bpk.go.id).

Salah satu upaya mewujudkan pemerintah yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Mardiasmo (2002), sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengembalian keputusan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, secara teoritis penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mencapai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dengan menerapkan pernyataan yang terkandung dalam standar akuntansi pemerintahan. Menurut Kusumah (2012) penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut Inapty (2016) yang memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) masih belum maksimal dilakukan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Menurut Pujanira (2017) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat. Sedangkan menurut Wardani (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih lemah, sehingga tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah umumnya terjadi karena pejabat atau petugas yang tidak optimal dalam

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lemah dalam pengawasan dan pengendalian dan kurang koordinasi antar pejabat terkait.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menyatakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Menurut Andini (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakain baik sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut widyatama (2017) sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan sehingga kualitas laporan keuangannya diragukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang ?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang ?
3. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang ?
4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di BPKAD Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis tentang Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang.

4. Untuk menganalisis tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menerapkan teori-teori yang selama ini diperoleh dalam bangku perkuliahan.

2. Mahasiswa Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai keuangan daerah dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah BPKAD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi dalam mengelola dan pengembangan Daerah dimasa depan, memberikan kontribusi kepada pimpinan pada sejauh mana peningkatan unit satuan kerja pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kota Semarang dan meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penelitian

Secara sistematis, pembahasan penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini disusun secara terperinci sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan serta serta pemberi saran.